



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
**UNIT KERJA** : WAKIL PIMPINAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : AHMAD SU'ADI
2. Jabatan : ANGGOTA OMBUDSMAN RI
3. NHK : 455605

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 2.544.092.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 106 m2/96 m2 di KOTA DEPOK ,  
HASIL SENDIRI Rp. 210.260.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 222 m2/600 m2 di KOTA DEPOK ,  
HASIL SENDIRI Rp. 639.828.000
3. Tanah Seluas 4685 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI  
Rp. 46.850.000
4. Tanah Seluas 749 m2 di KEBUMEN, WARISAN Rp. 45.240.000
5. Tanah Seluas 1553 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp.  
1.090.206.000
6. Tanah Seluas 622 m2 di KEBUMEN, WARISAN Rp. 8.708.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m2/59 m2 di KARANGASEM,  
HASIL SENDIRI Rp. 468.000.000
8. Tanah Seluas 600 m2 di SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 224.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA ALL NEW INOVA Tahun 2016, HASIL SENDIRI  
Rp. 200.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL  
SENDIRI Rp. 2.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL  
SENDIRI Rp. 6.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL  
SENDIRI Rp. 1.000.000
5. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.



15.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 205.000.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 20.000.000

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. 380.000.000

**Sub Total**

Rp. 3.373.092.000

**III. HUTANG**

Rp. 530.534.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 2.842.558.000

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.